

Polmas Digulirkan, Akankah Kejahatan Berkurang?

Oleh : Elly Burhaini Faizal

Sungguh unik kehidupan warga Ibukota. Jika dicermati, banyak hidup berdampingan, tapi tidak saling mengenal. Hubungan hanya bisa direkat jika mereka punya hubungan keluarga atau kekerabatan. Sebaliknya, uang justru acap dianggap "dewa" yang berhak menentukan segalanya. Berapa tidak? Untuk memperoleh perasaan aman, warga kota tidak keberatan merogoh koceknya.

JUTAAN rupiah sekalipun tak masalah, asalkan ia memperoleh keamanan. Memang, hal itu tidak salah. Tetapi, dari fenomena ini terlihat betapa aspek sosial kemasyarakatan sudah jauh ditinggalkan.

Dulu, keamanan bisa diciptakan secara swakarsa. Contohnya, adanya tanggung jawab warga menggelar ronda malam. Kini, di tengah modernitas yang ada, warga kota justru kian gagap mengantisipasi kejahatan.

Parsudi Suparlan, seorang sosiolog berpendapat, kota sebagai pusat keberadaan dan beredarnya uang, sekaligus sebagai tempat kehidupan yang masyarakatnya bercorak kompleks dan mengenal stratifikasi yang jelas batas-batas kelas sosialnya, adanya kemiskinan, pengangguran, dan berbagai rangsangan untuk hidup enak dan mewah, telah menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial dan kejahatan. "Hasrat untuk memperoleh uang secara cepat dan dalam jumlah yang besar, memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang berbeda dari kejahatan yang secara tradisional ada di daerah pedesaan," ungkap Parsudi.

Bagi orang kota, uang bukan hanya alat ukur untuk memperoleh barang dan jasa. Uang kini juga komoditi atau modal yang diperdagangkan. Sungguh memprihatinkan. Seiring kejahatan yang kian meruyak, upaya antisipatif pun dilakukan. Konsep Perpolisian Masyarakat (Polmas) atau *Community Policing* diusulkan sebagai salah satu alternatif jalan keluarnya.

■ Satjipto Rahardjo, Guru besar Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, berpendapat, Polmas mewadahi berbagai ide tentang tugas Polisi yang begitu luas dan lebih dekat kepada masyarakat. "Polmas adalah suatu model pekerjaan polisi yang berbeda dari pada model konvensional-tradisional yang selama ini sudah melekat pada identitas polisi, contohnya sebagai penegak hukum dan pemburu kejahatan." Ungkat Satjipto, dalam seminar Nasional "Penerapan Perpolisian Masyarakat" baru-baru ini. Di daerah perkotaan upaya mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang dialami warga kampung, RW, atau Kelurahan, mengikuti pola ronda bergiliran yang diilhami oleh warga pedesaan. Namun, kegiatan ronda di daerah perkotaan sering kali tidak efektif.

Pasalnya, warga kota sering kali merasa punya cukup uang untuk membayar peronda pengganti. "Maka, untuk tingkat perkotaan, Polmas dibentuk dan dioperasikan untuk warga dan komunitas yang ada di dalam kelurahan." Kata Parsudi mengimbuhkan. Pengorganisasian Polmas, menurutnya, dapat dilakukan dengan mengadopsi Koban yang terbukti efektif kerjanya di daerah perkotaan Jepang sedangkan di wilayah Polda Metro Jaya, konsep ini diupayakan diadopsi dengan membentuk Pos Polisi (Pospol). Tetapi, tanpa adanya perubahan mental polisi agar bersedia menjadi pelayan yang tulus bagi masyarakat, sulit diharapkan Polmas bisa terwujud. Itulah sebabnya, Polisi seharusnya tidak lagi ditempatkan dalam posisi berhadapan-hadapan (*vis a vis*) dengan masyarakat secara hirarkis,

melainkan egalitarian atau sejajar. "Polisi tidak berada di atas rakyat, melainkan bersama-sama rakyat. Polmas tidak menjadikan rakyat obyek, melainkan cenderung sebagai mitra," kata Setjipto menandakan. Secara konseptual, Polmas yang tengah dikembangkan oleh Polri sebagai pola perpolisian yang modern terdiri dari tiga konsep Polmas adalah perpolisian yang mengedepankan pemecahan masalah (*problem solving*), kemitraan (*partnership*), dan proaktif yang lebih mengutamakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Tiga aspek itu sangat substansial dalam upaya mencegah kejahatan yang sudah semakin kompleks, atau tidak lagi hanya sebatas pada kejahatan konvensional. Berbagai kejahatan transnasional kini tengah dihadapi, misalnya terorisme, penyelundupan dan perdagangan senjata api, perdagangan manusia, perompakan di laut, narkoba, pencucian uang, cyber crime, dan kejahatan ekonomi.

Kapolri Jenderal Polisi Sutanto berpendapat, gangguan keamanan dan ketertiban seperti itu tidak mungkin dihadapi hanya dengan mengandalkan kekuatan polisi semata. "Permasalahan tidak mungkin diatasi hanya dengan menambah kekuatan Polri, baik dalam bentuk tenaga manusia maupun di bidang peralatan teknologinya," ungkap lulusan Akabri Kepolisian tahun 1973 tersebut. Sebab, kata Sutanto, berbeda halnya dengan ancaman terhadap keamanan negara, ancaman terhadap keamanan secara umum nyaris seluruhnya bersumber dari masyarakat dan warga masyarakat itu sendiri. "Penegakan hukum, dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin efektif memecahkan seluruh permasalahan yang tengah dihadapi," ujar mantan Kalemdiklat Mabes Polri tersebut. Pedang hukum, menurutnya, selayaknya hanya diarahkan pada kejahatan dan gangguan keamanan yang memang perlu ditangani secara hukum. Itulah sebab-



nya konsep Polmas perlu diadopsi. Polmas itu sendiri bukan barang baru, sebab pernah dikembangkan dalam system keamanan swakarsa. "Dalam system itu, masyarakat perlu diberdayakan dalam hubungan kemitraan yang setara," ia menegaskan.

Penegakan HAM.

Bagi banyak kalangan, Polmas sulit dikembangkan tanpa adanya perubahan paradigma Polisi agar lebih menjunjung tinggi HAM. "Dalam rangka proses menuju masyarakat yang demokratis seperti kita lakukan sekarang, bagaimanapun juga polisi harus merubah paradigma dalam konteks Hak Asasi Manusia," ungkap Wakapolri Komjen Pol. Adang Dorojatun, saat berbincang dengan Pembaruan baru-baru ini. Langkah itu sendiri sudah dilakukan. Hampir di seluruh pendidikan Polri, masalah-masalah yang berhubungan dengan HAM sudah disampaikan baik dalam bentuk ceramah, pendidikan, hingga buku kuliah. Apabila sampai sekarang masih terjadi satu atau dua pelanggaran HAM, ia berpendapat hal itu bukan kesalahan yang diperbuat oleh institusi Polri melainkan oknum-oknumnya. "Mungkin saja mereka sedang emosional, ungkap Adang lebih jauh. Ia mengakui,

konsep *community policing* seperti yang diterapkan Koban di Jepang tidak bisa diadopsi atau ditiru secara penuh. Sebab kata Adang, kalau kita bicara tentang Polmas, budaya Indonesia ini jauh lebih dari dulu sudah mengenalnya. Misalnya, ronda, Siskamling dan sebagainya. Gagasan Polmas kini digulirkan, sebab di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa polisi bekerja dengan dibantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi khusus (Polsus), dan Pam swakarsa. "Tapi kan tidak jelas apa itu Pam Swakarsa. Karena itu bentuk-bentuk Pam Swakarsa atau pengamanan lainnya diarahkan kedalam konsep perpolisian komunitas, jadi, bagaimana polisi itu bisa menjadi mitra," ungkap Adang mengimbuhkan. Upaya ini adalah bagian dari perubahan Polri dalam rangka mampu mengubah untuk merubah perilaku anggota yang selama ini jadi bagian kekuasaan, agar bisa jadi bagian masyarakat.

"Perubahan Polri memang harus dilakukan tidak bisa ditolak," ujarnya. Apalagi, bagaimanapun juga pilar negara demokrasi adalah penegakan hukum, dengan salah satu kaki penopangnya adalah polisi. Maka, polisi harus siap mengubah budayanya. Siapkah Anda berubah, Pak Polisi?***